

Sosiologi, Ilmu Ekonomi, Dll, Masih Perlukah?

* Catatan Buat Ariel Heryanto

BARANGKALI para sarjana ilmu politik membaca tulisan Saudara Ariel Heryanto (AH) di harian ini tanggal 23/9/1994 akan memberikan reaksi bermacam ragam. Kemungkinan reaksi yang pertama adalah "marah," karena ada orang yang memperdebatkan dan meragukan manfaat ilmu politik.

Kemungkinan reaksi kedua adalah dengan menyatakan bahwa AH tidak tahu ilmu politik sehingga dia mengajukan ungkapan yang sinis terhadap ilmu politik karena ketidaktahuannya tersebut.

Kemungkinan reaksi ketiga adalah melihat bahwa ungkapan dan penilaian AH terhadap ilmu politik merupakan "tantangan" yang perlu dihadapi, kemudian mengaca diri apakah benar yang diutarakan oleh AH.

Saya menempatkan diri pada posisi ketiga dan mencoba menjelaskan apa sebenarnya politik, ilmu politik, ruang lingkup, fungsinya, dan lain sebagainya.

Politik dan ilmu politik

Banyak orang salah mengerti, atau sedikit mengerti tentang apa itu politik dan ilmu politik. Bagi mereka yang memahami ilmu politik dengan benar, politik diartikan sebagai "siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana," seperti yang diungkapkan oleh Harold Laswell. Atau yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh David Easton (1953, 1965a, 1965b), sebagai "authoritative allocation of values for a society", bagaimana mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat.

Otoritatif artinya sekali keputusan untuk mengalokasikan nilai-nilai tersebut ditentukan ma-

ka sifatnya mengikat (*binding*), negara mempunyai kemampuan untuk memberikan paksaan/sanksi fisik agar orang mematuhi.

Apa sajakah yang disebut bernilai, yaitu yang selalu dicari, dipertaruhkan, dan diperebutkan oleh orang, yang merupakan barang yang teramat langka di dalam kehidupan sehari-hari? Orang mempergunakan berbagai macam cara untuk memperolehnya, dan tidak jarang puluhan bahkan ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk itu.

Orang bertindak politik karena kelangkaan dari barang tersebut. Oleh karena itu orang bertindak politik sama dengan orang bertindak ekonomi, karena kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa. Barang-barang yang langka tersebut oleh Karl W. Deutsch (1974) diidentifikasi ke dalam delapan jenis, yaitu *power, enlightenment, respect, rectitude, wealth, health, skill, dan affection*. Ada juga yang menambahkan dengan *freedom dan order*.

Semua perilaku manusia yang berkaitan dengan hal-hal tersebut adalah perilaku politik. Tidak ada yang dapat menghindarkan diri dari politik. Udara yang kita hisap, air yang kita minum, makanan yang kita telan, tanah yang kita pijak, semuanya mempunyai makna politik selama manusia memiliki kepentingan yang menyangkut hal-hal tersebut. Oleh karena itu kalangan filsafat klasik telah mengungkapkan bahwa manusia itu "zoen politicon".

Ilmu politik adalah ilmu yang secara sistematis menjelaskan

Oleh Afan Gaffar

bagaimana interaksi manusia di dalam mengalokasikan, memperoleh, memperebutkan, mempertahankan kesepuluh hal di atas. Tentu saja tidak mungkin diuraikan secara panjang lebar dalam ruang yang terbatas tentang bagaimana hal itu dilakukan.

Ilmu politik merupakan ilmu yang sangat luas, seperti halnya dengan ilmu-ilmu lainnya, yang mencakup hampir seratus "subject matters," seperti yang diinventarisasi oleh Frederick Greenstein and Nelson Polsby (1975) di dalam *Handbook of Political Science* yang jumlahnya delapan volume. Ilmu politik diajarkan melalui sejumlah bidang studi, termasuk di dalamnya ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu perbandingan politik, teori/filsafat politik, dan ilmu kebijaksanaan publik.

"Citizenship Training"

Salah satu yang tidak, kurang, atau belum dipahami oleh orang lain, bahkan tidak jarang oleh kalangan ilmuwan politik sendiri, adalah bahwa fungsi ilmu politik tidak semata-mata dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, akan juga menyangkut bagaimana mendidik warga masyarakat di dalam meningkatkan kapasitasnya berpolitik dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi.

Dengan ilmu politik diharapkan untuk melatih orang bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar.

Dengan ilmu politik diajarkan bagaimana demokrasi dapat/tidak dapat tumbuh, berkembang, dalam sebuah masyarakat/negara. Dengan ilmu politik disebarkan pula nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan erat dengan rasa cinta kepada bangsa dan tanah air.

Apakah hal itu kemudian berhasil? Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan benar. Di negara yang sudah memiliki tradisi keilmuan yang kuat seperti di Eropa dan Amerika Utara kalangan ilmuwan politik dan masyarakat luas menyatakan dengan tegas bahwa mereka berhasil sebagaimana halnya dengan kalangan ilmuwan lainnya (Albert Somit and Tannenhaus, 1965; Dwight Waldo, 1975).

Di Dunia Ketiga yang terutama belum memiliki tradisi keilmuan yang kuat tentu saja hal itu masih jauh panggang dari api. Apakah hal itu semata-mata tanggung jawab ilmuwan politik? Sama sekali tidak karena hal itu merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan sebagaimana halnya dengan gagalnya ilmu-ilmu lainnya.

Di Indonesia

Saya percaya saudara AH memahami betul bagaimana sulitnya melakukan penelitian politik di Indonesia karena begitu kuatnya dominasi negara dalam segala aspek kehidupan kita. Cobalah Anda melakukan penelitian mengenai perilaku politik masyarakat, apakah yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah, pandangan, sikap, dan orientasi mereka tentang negara, apa dan bagaimana perilaku warga negara dalam beberapa pemilihan umum yang lalu.

Saya dapat menyatakan de-

ngan tegas bahwa izin dari kantor sopol tak akan keluar. Anda ingat peristiwa SUBURI tahun 1968 'kan? Saya sudah mengeluhkan hal ini di mana-mana, dalam pertemuan AIPI, dan bahkan kepada Wakil Ketua DPR zamannya Pak Syaiful Sulun di Jakarta.

Ilmuwan politik di Indonesia tak usah mencoba memberikan jawaban atas masalah yang sangat pelik dan kompleks seperti yang Anda ajukan, melakukan penelitian dasar saja tidak bisa. Pertanyaan yang Anda ajukan biasanya didiskusikan secara terbatas di beberapa seminar, itu pun harus mengurus izin. Di universitas yang cukup mapan seperti UGM, dan UI, mendiskusikan hal-hal yang Anda persoalkan tidak terlampaui sulit, apakah di ruangan kelas ataukah dalam seminar. Akan tetapi di perguruan tinggi lainnya birokrat universitasnya sendiri tidak jarang sudah pada takut.

Bukan hanya persoalan ilmu politik

Persoalan yang diajukan AH sebenarnya bukan hanya persoalan ilmu politik, tetapi juga persoalan semua bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang lainnya di negeri ini. Kalau orang mempersoalkan pengadilan sebagai sebuah teater apakah itu semata-mata persoalan ilmu politik? Bagaimana dengan ilmu hukum? Bagaimana dengan sosiologi, antropologi, dan bahkan bagaimana dengan ilmu ekonomi?

Kalau Edy Tanzil menilap uang negara (Bapindo) dengan melibatkan pejabat negara, bagaimanakah para sosiolog, ahli hukum, antropolog, dan terutama

(Bersambung ke hlm. 5 kol. 7-9)

Sosiologi

ma kalangan ekonom memberikan penjelasan tentang hal tersebut?

Para ekonom dan teknokrat/teknolog yang seharusnya memberikan penjelasan dengan baik dan benar tentang ideologi pembangunan yang sudah berjalan selama lima Pelita, mengapa sampai terjadi penumpukan kekayaan pada sejumlah kecil orang, mengapa masih ada 27 juta penduduk yang masih miskin, mengapa sampai ada kredit macet yang jumlahnya puluhan trilyun, mengapa utang negara dan masyarakat sudah mencapai 90 milyar dollar, mengapa perlunya dibangun jalan tol, mengapa perlu membangun pesawat terbang, mengapa hutan di-

(Sambungan dari halaman 4)

babat, mengapa nilai tukar petani semakin lemah, mengapa pemerintah memberikan proteksi yang besar terhadap industri dalam negeri, mengapa harga telepon genggam di Indonesia dua kali lebih mahal daripada harga barang yang sama di Singapura? Dan sejumlah masalah-mengapa lainnya.

Akan tetapi hal itu bukan semata-mata tugas kalangan ekonom menjelaskannya, karena para sosiolog, para ahli hukum, para psikolog, ilmuwan politik, dan bahkan antropolog, mempunyai tanggung jawab yang sama.

Kalau misalnya Rendra, Emha, Darmanto Yatman, Kiai Gus tafa Bisri, Umar Kayam, Gus

Dur, dan kalangan budayawan lainnya membaca puisi di TIM dengan mendapat bayaran yang memadai (bahkan Rendra diprotes di Yogya), kebetulan mereka memilih puisi yang memiliki muatan politik, apakah itu merupakan peristiwa politik yang isolatif, ataukah semata-mata peristiwa budaya, ataukah hanya sekadar aktivitas "ngamen" dalam tingkat tinggi?

Hal itu bukan semata-mata tanggung jawab ilmuwan politik menjelaskannya. Oleh karena itu, kalau Anda mempertanyakan apakah ilmu politik masih berguna, saya pun dapat mengajukan pertanyaan yang sama terhadap semua ilmu sosial lainnya.

* Afan Gaffar, staf pengajar Fisi-pol UGM, Yogyakarta.